

ABSTRAK

STRATEGI KELEMBAGAAN DPRD DALAM MENINDAKLANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (DAERAH PEMILIHAN 1 KOTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

ANNISA RAISYA RAIZANAH

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan institusi legislatif di tingkat daerah yang memegang fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, serta memiliki tanggung jawab dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan forum komunikasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi kelembagaan DPRD Provinsi Lampung dalam merespons aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, kajian ini mengacu pada teori strategi kelembagaan yang dikemukakan oleh Jack Kooten dalam Salusu (2006), yang menitikberatkan pada tiga elemen utama: struktur organisasi, kewenangan, dan prosedur operasional standar (SOP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi DPRD telah dibentuk secara formal, koordinasi antarunit kerja masih belum berjalan secara sinergis. Kewenangan yang dimiliki pun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara maksimal. Di sisi lain, SOP penanganan aspirasi yang difasilitasi melalui sistem E-Pokir belum disertai dengan mekanisme evaluasi yang terbuka dan pelaporan kepada masyarakat. Beberapa kendala seperti lemahnya sinergi antarbagian, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, serta minimnya partisipasi publik dalam proses evaluasi turut memperlemah efektivitas lembaga ini. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan kelembagaan melalui peningkatan koordinasi internal, pemanfaatan kewenangan secara strategis, penyempurnaan SOP yang bersifat partisipatif, serta keterlibatan publik yang lebih aktif agar DPRD dapat menjalankan perannya secara lebih transparan dan akuntabel.

Kata kunci: DPRD, strategi kelembagaan, aspirasi masyarakat, infrastruktur jalan, administrasi publik.

ABSTRACT

DPRD INSTITUTIONAL STRATEGY IN FOLLOWING UP ON PUBLIC ASPIRATIONS REGARDING ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (ELECTORAL DISTRICT 1, BANDAR LAMPUNG CITY)

By

ANNISA RAISYA RAIZANAH

The Regional House of Representatives (DPRD) functions as the legislative authority at the regional level, responsible not only for legislation, budgeting, and oversight but also for conveying public aspirations through recess sessions and other participatory mechanisms. This study explores the institutional strategy applied by the DPRD of Lampung Province in addressing community demands related to road infrastructure development in Electoral District 1 of Bandar Lampung City. Employing a descriptive qualitative method, the research is grounded in Jack Kooten's institutional strategy framework (as cited in Salusu, 2006), which emphasizes three key elements: organizational structure, authority, and standard operating procedures (SOPs). The findings indicate that although the DPRD's formal organizational setup exists, internal coordination remains weak, and its authority has yet to be strategically leveraged to ensure public aspirations are represented in development planning. Additionally, the SOPs used for managing public input, such as the E-Pokir system, lack mechanisms for transparent monitoring and public reporting. Challenges identified include poor inter-unit synergy, limited institutional and technological capacity, and low public involvement in the follow-up process. To enhance institutional responsiveness, improvements are needed in internal collaboration, strategic use of legislative authority, participatory SOP development, and greater civic engagement to foster more accountable and adaptive governance.

Keywords: DPRD, institutional strategy, public aspirations, road infrastructure, public administration.